



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 08 Februari 2019

Halaman: 15

PROGRAM PEMERINTAH

5 Poin Jadi Acuan Pembangunan Jogja

JOGJA—Pembangunan Kota Jogja bakal menasar lima poin strategis. Kelima poin yang dirinci dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 itu mencakup pembangunan fisik hingga reformasi birokrasi.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan kelima poin tersebut masing-masing adalah pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, reformasi birokrasi, tematik pembangunan.

Untuk pembangunan fisik, kata dia, ada sejumlah titik yang akan disasar, antara lain penataan kawasan pedestrian Kotabaru, Malioboro, pembangunan dan pemerataan sarpras sekolah dasar, pembangunan bangunan tinggi Balai Kota hingga penyediaan SPAM Regional. "Jadi semua poin nantinya masing-masing memiliki titik sasaran yang jelas," kata dia dalam *Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Awal RKPD 2020: Peningkatan Daya Saing sbg Pusat Pelayanan Jasa utk Masyarakat Berdaya dan Berbudaya* yang digelar di Grha Pandawa, kompleks Balai Kota Jogja, Kamis (7/2).

Khusus soal pembangunan bangunan tinggi di Balai Kota, dia menegaskan hal itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, saat ini kompleks Balai Kota kekurangan kapasitas tempat parkir bagi tamu. Dari kapasitas parkir mobil untuk 180 unit misalnya, dalam satu hari ada 250 unit mobil tamu yang datang ke kompleks Balai Kota, baik itu masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan maupun tamu pemerintahan. "Harapannya, dengan adanya pembangunan bangunan tinggi, Pemkot bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi untuk masyarakat," kata dia.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, Pemkot akan mengimplementasikan *single data* (data tunggal) agar pelaksanaan intervensi pemberdayaan bagi masyarakat bisa lebih fokus. *Single data* akan diterapkan dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) pemberdayaan. Hadirnya SIM dihaarakannya bisa membantu pelaksanaan intervensi kepada masyarakat juga lebih memiliki *road map* (peta jalan). "Dulu tidak ada *road map*, jadi intervensi tidak begitu jelas," ucapnya.

Kepala Bappeda Jogja, Heri Karyawan mengatakan penyusunan RKPD yang menjadi pedoman pembangunan itu diawali melalui proses musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan. Setelah itu dilanjutkan perencanaan dan musrenbang di tingkat Pemerintah Kota Jogja. Harapannya, dari tahapan tersebut bisa dihasilkan kebutuhan yang berkonsep pembangunan yang jelas di kampung dan kelurahan.

Menurut dia, ada satu lagi yang perlu digarisbawahi oleh OPD, yakni harus membuat urutan prioritas dalam perencanaan. Sehingga bila kemampuan keuangan daerah nantinya tidak memungkinkan, maka akan dirasionalisasi agar pelaksanaannya menjadi lebih mudah. "Dengan menurunkan output maupun mengurangi target kinerja," ucapnya. (Uti Febriarni)

Poin Strategis Pembangunan Jogja

1. Pembangunan Fisik
 - Penataan kawasan pedestrian Kotabaru,
 - Penataan Kawasan Malioboro,
 - Penataan Kotagede,
 - Penataan Pojok Beteng Wetan
 - Rehabilitasi gedung Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja.
 - Manajemen rekayasa lalu lintas,
 - Pembangunan rusun kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo,
 - Pembangunan dan pemerataan sarpras Sekolah Dasar,
 - Pembangunan tower Balai Kota
 - Penyediaan SPAM Regional.
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Reformasi Birokrasi
5. Tematik Pembangunan

Sumber: Pemkot Jogja (utl)

Instansi	Nilai	Sifat	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> N	B	D
2.	<input type="checkbox"/> P	B	D
3.	<input type="checkbox"/> N	B	D
4.	<input type="checkbox"/> P	B	D

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005